

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan dalam pembangunan ekonomi yang menghambat terciptanya kehidupan yang adil sejahtera serta merata yang mana merupakan tujuan pencapaian oleh setiap Negara. Berbagai macam pemikiran dan tindakan untuk mewujudkan hasil yang baik tersebut perlu dikelola dengan sangat teliti agar terwujud hasil yang terbaik. Melakukan evaluasi untuk setiap hasil dari eksekusi perencanaan dan program dalam pembangunan yang telah dijalankan adalah salah satu caranya, evaluasi ini akan sangat memberikan dampak terhadap pembangunan yang berkelanjutan sehingga menjadi lebih baik. Tujuannya tak lain adalah agar terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat dengan adil dan merata terhadap seluruh golongan masyarakat.

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan juga merupakan *cross sectors problem*, *cross areas* dan *cross generation*, sehingga untuk menanganinya dibutuhkan pendekatan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mensukseskan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan *political will* (Rejekiingsih, 2011).

Kemiskinan termasuk kepada masalah multidimensional, tidak hanya masalah ekonomi saja namun juga menyangkut masalah sosial, budaya, dan

politik. Karena sifatnya yang multidimensional, maka kemiskinan juga memerlukan solusi yang multidimensional pula. Berbagai program baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah diusahakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Bahkan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang menggantikan MDGs di akhir 2015.

Ada banyak sumber yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Bank Dunia mengukur kemiskinan dengan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US \$ 1 per hari per kapita. Batas garis kemiskinan Bank Dunia adalah pendapatan perkapita per hari US \$ 1. Sedangkan garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum pangan dan nonpangan. Permasalahan kemiskinan didapati pada setiap Negara di dunia baik itu Negara maju atau Negara yang sedang berkembang.

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang dimana kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi sorotan utama. Bahkan sejak tahun 1976 sampai sekarang kemiskinan telah menjadi permasalahan dalam pembangunan. Kondisi kemiskinan di Indonesia dapat tergambarkan oleh banyaknya ditemui gelandangan, fakir miskin, pengemis, bayi kurang gizi dan anak jalanan. Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan pelik yang tidak mempunyai ujung pangkal. Dalam mengatasi permasalahan terkait kemiskinan ini umumnya menghadapi kesulitan seperti populasi penduduk itu sendiri, kesehatan pada masyarakat pada suatu kawasan wilayah (BPS, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 860.000 orang (0,26 persen) dibanding dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Kepala BPS Suryamin mengatakan, selain mengukur jumlah penduduk miskin dan persentasenya, BPS juga mengukur indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 menunjukkan tren meningkat dibandingkan Maret 2012, Maret 2013, dan Maret 2014. Makin besar indeks keparahan kemiskinan, maka beda pengeluaran antar penduduk miskin makin jauh, tidak terkumpul pada satu angka. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah (0,535), meningkat dari Maret 2014 yang ada di level (0,435), Maret 2013 (0,432), dan Maret 2012 (0,473). Tak hanya indeks keparahan, indeks kedalaman kemiskinan pun meningkat

Pulau Sumatera terdapat penduduk miskin sebanyak 6.318.870 jiwa dimana Sumatera Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar menyampaikan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat pada 2015 mencapai 5,41 persen atau melampaui pertumbuhan nasional yang hanya 4,79 persen, meskipun melambat dibanding 2014 yang tumbuh 5,86 persen sementara itu di Sumatera Barat, persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 berjumlah 379.600 jiwa. Total penduduk miskin di Sumatera Barat tersebut terbagi dalam 12 kabupaten dan 7 Kota dimana kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki jumlah penduduk miskin 13.160 jiwa, kabupaten Pesisir Selatan 38.130 jiwa, kabupaten Solok

36.420 jiwa, kabupaten Sijunjung 17.520 jiwa, kabupaten Tanah Datar 20.050 jiwa, kabupaten Padang Pariaman 35.870 jiwa, kabupaten Agam 36.060 jiwa, kabupaten Lima Puluh Kota 28.760 jiwa, kabupaten Pasaman 21.880 jiwa, kabupaten Solok Selatan 11.950 jiwa, kabupaten Dharmasraya 15.890 jiwa, kabupaten Pasaman Barat 32.340 jiwa, Kota Padang 44.430 jiwa, Kota Solok 2.720 jiwa, Kota Sawahlunto 1.340 jiwa, Kota Padang Panjang 3.440 jiwa, Kota Bukittinggi 6.540 jiwa, Kota Payakumbuh 8.510 jiwa dan Kota Pariaman 4.580 jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin berdasarkan provinsi tahun 2014, Sumatera Barat menunjukkan jumlah penduduk miskin yang lebih kecil yaitu 354.740 jiwa, angka ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 ke 2015 (BPS Sumatera Barat, 2015).

Sumatera Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat namun disini terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, ini mengindikasikan kebijakan PEMDA Sumatera Barat masih belum berhasil dalam pengentasan kemiskinan lebih lanjut, maka perlu dilakukan identifikasi dari faktor-faktor yang berkaitan dengan kemiskinan agar dapat disusun kebijakan ekonomi yang layak. Jika kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dapat diformulasikan dan dilaksanakan, maka pengetahuan yang lebih dalam tentang karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menjadi sangat penting (Rodriguez dan Smith, 1994 diacu dalam Ghazouani dan Goaid, 2001). Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masih tidak terlalu banyak. Oleh karena itu penelitian mengenai hal tersebut sangat

berguna karena penyebab kemiskinan perlu dipahami dalam rangka menyusun kebijakan yang lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Kemiskinan telah menjadi suatu barometer sosial ekonomi dalam menilai kesuksesan pembangunan oleh pemerintah kepada wilayahnya. Permasalahan sosial lainnya akan ikut muncul seiring peningkatan kemiskinan ini. Sesuai dengan tujuan pembangunan yang sudah menjadi referensi yang substansial yaitu menurunkan level kemiskinan hingga separuhnya, namun kenyataannya level kemiskinan daerah Sumatera Barat mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dimana, jumlah penduduk miskin meningkat dari 354.740 jiwa menjadi 379.600 jiwa (data BPS)

Berdasarkan pada rumusan masalah dapat diidentifikasi beberapa masalah lain sebagai pendukung, antara lain sebagai berikut :

- 1 Bagaimana kondisi kemiskinan di Sumatera Barat?
- 2 Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- 1 Menguraikan kondisi miskin di Sumatera Barat.
- 2 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat dipetik sejumlah manfaat baik untuk masyarakat pada umumnya, para peneliti dan akademisi guna penelitian lanjutan, maupun pemerintah. Dengan mengetahui karakteristik penduduk miskin, dan faktor-faktor yang menyebabkan penduduk menjadi miskin, maka dapat disusun suatu kebijakan yang sesuai lebih terarah mengenai penanganan masalah kemiskinan .

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

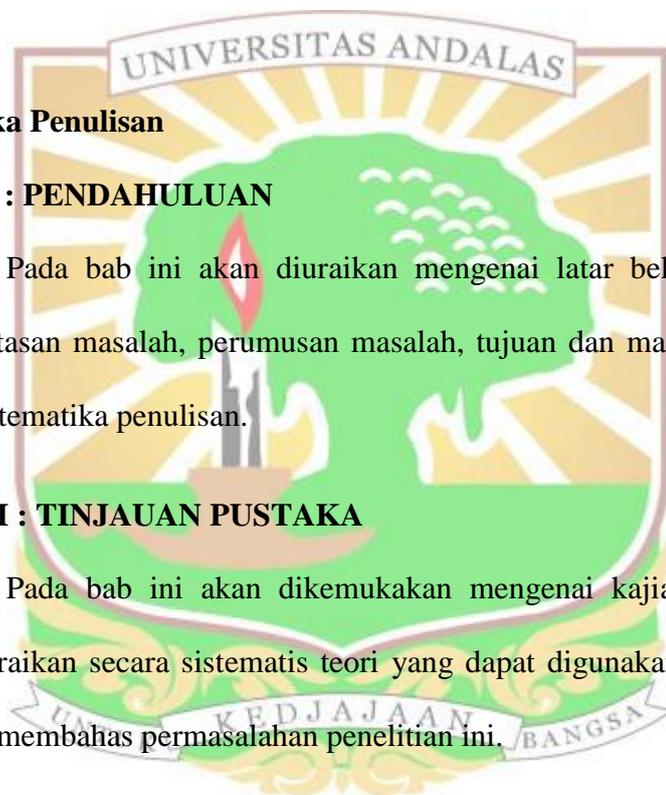
Pada bab ini akan dikemukakan mengenai kajian teoritis yang menguraikan secara sistematis teori yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membahas permasalahan penelitian ini.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan model yang akan digunakan, populasi dan sampel, sumber data dan defenisi opsional serta teknik analisa data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah dan penduduk di Sumatera Barat.



## **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini menguraikan tentang hasil penemuan empiris dari hasil perhitungan dan pengolahan data dengan analisis regresi logistik, yang pada akhirnya akan memberikan hasil hal-hal apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini merupakan bagian penutup dari tulisan penelitian ini, terdiri dari kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu, baik untuk pemerintah daerah maupun untuk penelitian selanjutnya.

